

Kontribusi Terintegrasi Dinas PUPR Provinsi NTB Dalam Membangun Infrastruktur Jalan

Nafillah¹, Fikri Haikal², Samsul Hadi³, Emil Tazahroq⁴

^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Mataram, nafillahnafillah@gmail.com

Keywords:

PUPR Departement,
Road,
Infrastruktur,

Abstract: Road Infrastructure Development in NTB Province requires the government's role in planning road infrastructure development to be carried out within the region, through the Highways Field at the NTB Provincial PUPR Office. The purpose of this study is to determine the extent of the role and contribution of the NTB Provincial PUPR Office in road infrastructure development within NTB Province. This research uses a qualitative descriptive method by describing the objects studied in the form of the results of interviews with related agencies. From the results of this research, it was found that the NTB Province PUPR Service has carried out its role and contributed directly in accordance with its duties and authority in the development of road infrastructure within the NTB Province, although it is still not in accordance with what is targeted by the RPJMD. Through several stages, namely getting proposals from the community, forwarding them to the relevant agencies including the Village/Subdistrict Head, Subdistrict Head, and Regent/Mayor, then to the NTB Provincial PUPR Service which will be discussed directly at the Development Plan Deliberation. Through evaluation and selection of the results of development plan deliberations so that results are obtained in the progress of a development area. Road infrastructure really needs to be paid attention to by the government, because this is very important to improve community road access to basic services and to increase productivity and increase competitiveness.

Kata Kunci:

Dinas PUPR
Jalan
Pembangunan

Abstrak: Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi NTB memerlukan peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur jalan yang akan dilakukan dalam daerah, melalui Bidang Bina Marga pada Dinas PUPR Provinsi NTB. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran dan kontribusi Dinas PUPR Provinsi NTB dalam Pembangunan infrastruktur jalan di lingkup Provinsi NTB. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggambarkan obyek yang di teliti berupa hasil wawancara dengan dinas terkait. Dari hasil penelitian ini di dapatkan bahwa Dinas PUPR Provinsi NTB telah melaksanakan peran dan berkontribusi langsung sesuai dengan tugas dan kewenangannya dalam Pembangunan infrastruktur jalan di lingkup Provinsi NTB walaupun masih belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh RPJMD. Melalui beberapa tahapan yaitu mendapatkan usulan dari masyarakat, diteruskan ke instansi-instansi terkait meliputi Kepala Desa/Kelurahan, Camat, dan Bupati/walikota, lalu ke Dinas PUPR prov ntb yang akan di bahas langsung pada Musyawarah Rencana Pembangunan. Melalui evaluasi dan seleksi hasil musyawarah rencana Pembangunan sehingga diperoleh hasil dalam kemajuan suatu wilayah pembangunan Infrastruktur jalan sangat perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah, karena hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses jalan masyarakat pada pelayanan dasar dan untuk meningkatkan produktivitas serta meningkatkan daya saing,

Article History:

Received: 25-05-2024

Online : 15-06-2024



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



A. LATAR BELAKANG

Pembangunan infrastruktur di wilayah nusa NTB terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat salah satunya adalah infrastruktur Jalan. Infrastruktur jalan merupakan lokomotif yang sangat penting untuk menggerakkan Pembangunan ekonomi. Infrastruktur jalan juga menjadi penentu dalam kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Melalui Pembangunan jalan, daerah tentu dapat meningkatkan akses jalan dan mempercepat distribusi barang dan jasa.

Menurut Grigg (1988) infrastruktur merupakan sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi. (Grigg, 1988)

Perencanaan Pembangunan suatu daerah salah satunya provinsi NTB dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang merujuk pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan Pembangunan selama 5 tahun. RPJMD disusun dengan memperhatikan aspek kelayakan sosial dan lingkungannya dari masing-masing program yang dijalankan. Rencana Pembangunan ini sendiri merupakan hasil dari musrembang Tingkat desa/kelurahan sampai dengan musrembang Tingkat provinsi. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan suatu perangkat daerah yang wewenang dan tanggung jawab atas perencanaan, Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik salah satunya adalah jalan.

Jalan merupakan salah satu sarana transportasi publik yang sangat penting dalam suatu wilayah. Namun masih ada beberapa jalan yang masih cukup memprihatinkan salah satunya adalah ruas jalan raya praya-mantang lebih tepatnya di pertigaan jalan pertemuan jalan Basuki Rahmat dengan jalan pahlawan. Kepala Dinas PUPR Kab. Loteng Lalu Rahadian menyebutkan bahwa status jalan tersebut masih menjadi kewenangan Dinas PUPR Provinsi NTB karena merupakan jalan provinsi. Tak jarang ada pengendara yang terjatuh karena Jalannya yang berlubang dan tidak rata. Pemerintah kabupaten Lombok tengah telah mengusulkan ke provinsi untuk segera memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Dengan adanya prasarana jalan yang baik sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi di wilayah nusa Tenggara barat dan dapat meningkatkan pendapatan dalam suatu wilayah.

Untuk itu dilakukan nya penelitian ini agar mengetahui peran Dinas PUPR Provinsi NTB melalui bidang bina marga yang merupakan salah satu dari susunan organisasi Dinas PUPR Provinsi NTB yang bertugas sebagai pelaksana Pembangunan dan rehabilitasi prasarana jalan. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus menuntut pemerintah untuk terus mengembangkan peran dan fungsi pemerintah, pemerintah diharapkan mampu melakukan pemaksimalan dalam menjalankan peran dan fungsi tersebut.

B. METODE

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitiaannya adalah Dinas PUPR Provinsi NTB yang berperan sebagai pelaku dalam perencanaan Pembangunan. Jadi, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami objek penelitian berdasarkan situasi yang telah terjadi dilapangan. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas PUPR Provinsi NTB yang terletak di Jl. Majapahit No.11, Kekalik Jaya, Kec. Sekarbela, Kota Mataram dan yang menjadi focus pada penelitian ini adalah Bidang Bina

marga yang memiliki tugas sebagai pelaksana infrastruktur jalan dan rehabilitasi prasarana jalan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas PUPR Prov NTB dalam Pembangunan infrastruktur jalan, dan untuk mengetahui apa saja penyebab dan hambatan yang dialami Dinas PUPR Provinsi NTB dalam Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Provinsi NTB sehingga bisa dijadikan bahan evaluasi untuk kedepannya. Dalam penelitian ini tahapan yang digunakan adalah kegiatan wawancara dan melakukan analisis dokumun. Berikut adalah tahapan yang dilakukan:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan 2 orang atau lebih sebagai narasumber yang akan memberikan informasi tentang penelitian untuk mengetahui sudah sejauh mana peran dan kontribusi Dinas PUPR Provinsi NTB dalam melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Jalan suatu wilayah. Adapun narasumber yang menjadi objek penelitian ini adalah staf yang ada pada bidang terkait.

b. Analisis Dokumen

Dalam penelitian ini dokumen dapat dipakai sebagai media untuk menggali informasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang terdiri dari hasil wawancara dan data sekunder yang terdiri dari Lembaga pemerintahan terkait.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kontribusi Dinas PUPR dalam Pembangunan infrastruktur jalan

Pembangunan Infrastruktur Jalan di Provinsi NTB merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas Masyarakat dalam membangun ekonomi di wilayah tersebut. Pembangunan infrastuktur melakukan serangkaian kegiatan yang akan melibatkan perencanaan, Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan Dalam rencana Pembangunan jalan biasanya akan melibatkan beberapa studi diantaranya adalah studi kelayakan , studi analisis lalu lintas, identifikasi rute alternatif, serta konsultasi dengan Masyarakat setempat.

Tahapan awal dalam perencanaan Pembangunan jalan akan dimulai pada Tingkat desa/ kelurahan, Kemudian hasil dari MUSREMBANG Tingkat Desa/ Kelurahan akan diusulkan ke Tingkat kecamatan. Setelah itu Hasil dari MUSREMBANG Tingkat kecamatan akan diusulkan ke Tingkat Kab/Kota, dan hasil MUSREMBANG Tingkat Kab/kota inilah yang akan menentukan skala prioritas setiap kegiatan. Dari hasil MUSREMBANG tersebut yang kemudian akan di ajukan ke Badan Perencanaan Pembangunan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat berperan penting dalam Pembangunan salah satunya adalah Pembangunan jalan karena jalan merupakan akses utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Pembangunan jalan di NTB dilaksanakan guna menyeimbangkan aksesibilitas antar wilayah dan antar sektor sehingga mewujudkan pemerataan Tingkat kemantapan infrastruktur jalan antar wilayah dan antar sektor.

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB berperan sebagai penyusun rencana Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sesuai dengan kebutuhan dan dapat mengajukan anggaran untuk proyek jalan. Kepala dinas juga berperan untuk mengawasi proses Pembangunan jalan agar sesuai dengan spesifikasi teknis dan waktu yang telah ditetapkan.

Kemudian kepala dinas juga berperan untuk memantau kemajuan proyek tersebut dan mengevaluasi hasilnya untuk memastikan kualitas dan waktunya. Kepala dinas juga turut Menangani keluhan Masyarakat dan memastikan jalan yang dibangun telah memenuhi kebutuhan public dan telah dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Peran ini sangat penting dalam memastikan infrastruktur ini berjalan dengan baik karena hal ini akan sangat mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Serta dapat meningkatkan pendapatan di wilayah tersebut.

Panjang jalan di Prov NTB adalah 8.047,29 km yang dibedakan berdasarkan jalan nasional 937,96 km dan jalan provinsi 1.484,43 km. Serta jalan kabupaten/kota 5.624,9 km. Penanganan jalan provinsi ini dilakukan melalui sumber dana dari APBD dan DAK.

Tabel 1. Kemantapan jalan provinsi tahun 2019-2022

NO	VARIABEL	2019		2020		2021		2022	
		P. Lombok	P. Sumba						
1	Tingkat Kemantapan (%)	80,28%		80,05%		84,01%		84,52%	
2	Tingkat Kemantapan Per Pulau	97,95 %	70,51 %	95,59 %	71,47%	98,26%	76,13 %	94,61 %	78,94 %
3	Panjang Ruas (km)	528,16	956,27	528,16	956,27	528,16	956,27	528,16	956,27
4	Kondisi Permukaan (km)	528,16	956,20	528,16	956,20	528,16	956,20	528,16	956,20
5	-Baik	501,93	628,88	468,54	607,57	410,342	616,13	435,19	650,54
6	-Sedang	15,40	45,42	36,35	75,80	108,605	111,92	64,52	104,32
7	-Rusak Ringan	2,45	22,80	5,13	19,31	5,137	16,68	14,70	15,32
8	-Rusak Berat	8,39	259,16	18,14	253,52	4,076	211,53	13,75	186,09

Dari tabel di atas pada tahun 2021 Dinas PUPR NTB telah mencapai kemantapan jalan yaitu 84,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar 83,95%. Kemantapan jalan pada tahun 2021 telah melampaui target yang telah ditetapkan oleh RPJMD 2019-2023. Namun, pada tahun 2022 Dinas PUPR Provinsi NTB tidak mampu mencapai pemantapan jalan yang telah di tetapkan tersebut. Dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 85,38%, dinas PUPR Provinsi NTB hanya mampu mencapai 84,52%.

Kemudian Pada tahun 2023 menurut kondisi jalan kota di Prov NTB sepanjang 627,96 km, jalan kabupaten 5.457,08 km dan jalan provinsi sepanjang 1.484,43 km. Dan berdasarkan laporan dari Bappeda NTB kemantapan jalan nasional tahun 2023 berada di angka 97,04 % dan jalan provinsi berada di angka 84,52%. Dan ini tidak sesuai dengan prosentase kemantapan jalan dalam RPJMD NTB 2019-2023 dengann visi NTB Gemilang pada tahun 2023 sebesar 86,60%. Berarti selama 2 tahun berturut-turut kondisi Tingkat kemntapan jalan di NTB terus menurun dan tidak mencapai target RPJMD.

Pada Saat ini ada 108 ruas jalan provinsi dengan Panjang 1.484.43 km. Dari jumlah di tersebut, 35,58% berada di pulau Lombok dan 64,42 berada di pulau sumbawa. Kemudian Tingkat kemantapannya sudah tergolong cukup baik yaitu 80,5%. Tetapi ini belumlah hasil akhir mengingat sekarang masih Triwulan ke III tahun 2024.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa dinas pupr provinsi telah memberikan kontribusi yang sangat baik dalam Pembangunan infrastruktur jalan. Walaupun kepastian jalan yang dicapai mengalami naik turun dari target yang ditetapkan. Kondisi kemantapan jalan ini bisa terjadi karena berbagai program yang telah dilakukan pemprov NTB. Salah satunya adalah program percepatan Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Sejauh ini program ini telah berhasil mengurangi kondisi jalan yang rusak menjadi semakin baik sehingga Masyarakat dapat menggunakan akses jalan tersebut.

2. Penyebab dan Hambatan yang di alami Dinas PUPR PROV NTB dalam Memelihara dan Membangun infrastruktur jalan

Belum tercapainya kemantapan jalan yang telah ditetapkan oleh RPJMD disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan akibat masih tingginya pelanggaran terhadap muatan kendaraan. Banyak kendaraan yang melebihi kapasitas maksimum yang menyebabkan tekanan yang berlebihan pada permukaan jalan sehingga dapat menyebabkan kerusakan dan keretakan pada permukaan jalan. Biasanya hal ini sering terjadi pada truk dan kendaraan besar lainnya yang membawa muatan melebihi batas yang telah di izinkan.

Penyebab selanjutnya adalah akibat dari bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor atau badai masih rawan terjadi Provinsi NTB hal dapat menyebabkan Pembangunan infrastruktur jalan menjadi terhambat. Gempa bumi dapat merusak material atau peralatan konstruksi sehingga menyebabkan proyek dihentikan sementara waktu hal ini terjadi karena infrastruktur di Provinsi NTB belum berbasis mitigasi bencana

D. SIMPULAN DAN SARAN

Dinas PUPR Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan peran penting dalam Pembangunan salah satunya adalah Pembangunan jalan karena jalan merupakan akses utama dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dinas pupr telah berperan sebagai perencana Pembangunan dan penyusun anggaran, kemudian mengawasi dan memantau jalannya kegiatan agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari segi kemantapan jalan provinsi yang ada di NTB, walaupun masih belum optimal namun Pembangunan jalannya telah berjalan cukup baik dikarenakan beberapa kendala salah satunya cuaca ekstrim atau bencana alam yang meyebabkan Pembangunan infrastruktu jalan menjadi terhambat dan terganggu. Hal ini juga terjadi karena di Prov NTB masih belum memiliki infrastruktur yang berbasis mitigasi bencana. Dinas PUPR Provinsi NTB terus mengupayakan yang terbaik dalam Pembangunan infrastruktur jalan di provinsi NTB untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

Untuk kedepannya penulis berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan masalah yang jalan yang ada di nusa tenggara barat dan memberikan tanggapan cepat terhadap keluhan Masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Terutama kepada Ibu Siti Atika Rahmi selaku dosen pembimbing selama kami melakukan penelitian ini. Kami ucapkan terima kasih juga kepada jajaran para pegawai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah menerima melakukan penelitian. tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada diri kami sendiri yang sudah berjuang dengan Ikhlas dalam melakukan penulisan ini.

REFERENSI

- C. Hermawan, B. Laporan, S. Informasi, & P. Daerah (2019). Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) Dalam Pengendalian Banjir Di Kelurahan Sidodadi Kecamatan. *eJournal Ilmu Pemerintah*, 7(1). 465-478.
- DPUPR, *Laporamn Rencana Kerja Dinas PUPR Provinsi NTB*. 2021
- Febrianika, M., Salena, I. Y., & Sari, D. P. (2022). Peran Bidang Program Dinas PUPR Dalam Pembangunan Jalan Di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Teknik UNIDA*, 3(1).
- Grigg, S. N. (1988). *Infrastructure Engineering and Management*. Universitas Michigan: Wiley & Sons.
- Hakim, D. A., Nopriza, H., Syari'ah, F., Raden, U., & Lampung, I. (2022). PERAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA. *Jurnal Hukum POSITUM*, 7(2), 205-227. <https://dadansetiana.wordpress.com/pengertian-siyasah-syariyyah-dan-fiqih-siyasah-serta-cakupan->
- Hamdani Fajri, Syahyuman. "Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis di Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi." *E-Journal*, Vol. 1, No.1, 2012.
- Ilham, R., Yusra, A., & Amir, A (2023). Peran Bidang Jalan Dinas PUPR Aceh Barat Dalam Penanganan Dan Pembangunan Jalan Di kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ilmiah Teknik UNIDA*, 4(1). 94-98.
- Moh, L. N., & Nazar Fajri, S. E. (2017). PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus di Desa Jenggala Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara). In *MPA Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jurnal SIKAP* (Vol. 1).
- Sadikin, S., Hannan, S., & Sunani, U. (2021). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN ULUMANDA. *Journal Peqquruang: Conference Series*, 3(2), 834. <https://doi.org/10.35329/jp.v3i2.2215>
- Safitri, A., Sari, A. D. P., Normafufah, F., & Is'adi, M (2024). Peran DPU BMSDA Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan Dan Pemeliharaan Jalan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Nusantara*, 2(1), 17-20.